



Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi di Kota Tual: Periode 2008–2024

Wahyuni Andi Aziz^{1*}, Muhammad Bugis², Andre Sapthu³

¹Program Studi Magister Ekonomi terapan, Universitas Pattimura, Indonesia

²⁻³Fakultas Ekonomi, Universitas Pattimura, Indonesia

*Penulis Korespondensi: wahyunilandlazlz@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the effect of regional financial performance on economic growth in Tual City. Regional financial performance reflects the local government's ability to manage financial resources effectively, efficiently, and independently in support of sustainable economic development. The study is theoretically grounded in Fiscal Decentralization Theory, which holds that granting financial authority to local governments can strengthen fiscal independence, improve resource allocation, and accelerate regional economic growth. The variables include regional financial independence, budget efficiency, and the effectiveness of financial management as independent variables, with economic growth as the dependent variable. Secondary data were obtained from the Budget Realization Reports and Gross Regional Domestic Product (GRDP) of Tual City for the period under study. Multiple linear regression was used to test the relationship between regional financial performance and economic growth. The results indicate that regional financial performance has a positive and significant relationship with economic growth. They further confirm that higher levels of regional financial independence and effectiveness make a greater contribution to GRDP growth and community welfare.*

Keywords: *Budget Efficiency; Economic Growth; Effectiveness of Financial Management; Fiscal Independence; Regional Financial Performance.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Tual. Kinerja keuangan daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan secara efektif, efisien, dan mandiri guna mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan. Secara teoretis, penelitian ini berlandaskan pada Teori Desentralisasi Fiskal, yang menyatakan bahwa pemberian kewenangan keuangan kepada daerah dapat meningkatkan kemandirian fiskal, memperbaiki alokasi sumber daya, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kemandirian keuangan daerah, efisiensi keuangan daerah, dan efektivitas pengelolaan anggaran sebagai variabel independen, sedangkan pertumbuhan ekonomi menjadi variabel dependen. Data sekunder diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Tual selama periode analisis tertentu. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda untuk menguji hubungan antara kinerja keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menegaskan bahwa semakin tinggi tingkat kemandirian dan efektivitas keuangan daerah, semakin besar kontribusinya terhadap peningkatan PDRB dan kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: Efektivitas Pengelolaan Keuangan; Efisiensi Anggaran; Kemandirian Fiskal; Kinerja Keuangan Daerah; Pertumbuhan Ekonomi.

1. LATAR BELAKANG

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi melalui pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan transparan (Sulastri et al., 2025). Sejak diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah kota dituntut untuk mampu mengelola keuangan secara mandiri dan akuntabel guna mendukung kesejahteraan masyarakat. Kinerja keuangan daerah menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana kemampuan daerah mengoptimalkan pendapatan dan mengalokasikan belanja publik secara produktif. Namun, realitas menunjukkan bahwa banyak pemerintah daerah di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mencapai kemandirian fiskal dan efisiensi anggaran. Ketergantungan pada

dana transfer pusat masih tinggi, sehingga kemampuan daerah dalam mendukung pembangunan ekonomi belum optimal. Kondisi ini ditegaskan oleh (Frinaldi et al., 2025) bahwa ketergantungan fiskal yang tinggi dapat menghambat inovasi pembangunan daerah.

Evaluasi kinerja keuangan daerah menjadi penting karena berfungsi sebagai alat untuk menilai kemampuan fiskal pemerintah dalam membiayai kebutuhan masyarakat dan program pembangunan. Rasio-rasio keuangan seperti efektivitas, efisiensi, kemandirian, dan keserasian belanja memberikan gambaran sejauh mana pengelolaan keuangan telah mencapai target pembangunan ekonomi. Penelitian oleh Rahmadia et al., (2017), menegaskan bahwa pengukuran kinerja keuangan daerah mampu mencerminkan tanggung jawab fiskal dan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas. Dengan demikian, kinerja keuangan tidak hanya menjadi ukuran administratif, melainkan juga berimplikasi langsung terhadap pembangunan ekonomi lokal (Mulia & Widiatmoko, 2025). Kinerja yang buruk akan membatasi kemampuan daerah untuk membiayai investasi publik dan memperkuat daya saing ekonomi.

Berbagai penelitian telah menunjukkan adanya hubungan positif antara kinerja keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi wilayah. Studi oleh Mardiasmo (2021), mengemukakan bahwa daerah yang memiliki tingkat kemandirian keuangan tinggi cenderung menunjukkan peningkatan produktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, daerah dengan pengelolaan keuangan yang tidak efisien mengalami kesulitan dalam menciptakan pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ini, transparansi dan akuntabilitas menjadi dua aspek penting dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah. Penerapan prinsip good governance dapat meningkatkan kepercayaan publik sekaligus menarik investasi lokal yang mendukung pembangunan ekonomi. Dengan demikian, peningkatan kualitas pengelolaan keuangan akan berdampak langsung terhadap dinamika ekonomi daerah.^b

Kota Tual sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Maluku memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama di sektor kelautan dan perikanan. Namun, optimalisasi potensi tersebut sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam mengelola keuangan dan mengarahkan anggaran ke sektor-sektor produktif (Tatarkin et al., 2015). Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tual Tahun 2022, realisasi pendapatan mencapai 99,92 % dari target, tetapi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya terealisasi 70,03 %, menunjukkan adanya tantangan dalam kemandirian fiskal (Lintas Pulau, 2023). Walaupun demikian, Kota Tual telah berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tujuh tahun berturut-turut, yang menandakan adanya komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas

public (Tethool, 2017). Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi lebih lanjut mengenai sejauh mana capaian tersebut berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi kota.

Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kota Tual juga menunjukkan peningkatan signifikan dalam komposisi pendapatan daerah. Berdasarkan laporan RAPBD 2024, komposisi pendapatan daerah naik hingga 92,06 % dibandingkan tahun sebelumnya, menandakan upaya pemerintah memperkuat basis fiskal daerah (Tual News, 2023). Meski demikian, realisasi PAD yang belum optimal dan belanja modal yang fluktuatif masih menjadi hambatan dalam mendukung pembangunan ekonomi secara konsisten. Kondisi ini sejalan dengan temuan Arif & Lubis (2021), yang menyoroti bahwa peningkatan pendapatan tidak selalu diikuti dengan efisiensi belanja jika manajemen keuangan tidak dijalankan secara produktif. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas tata kelola keuangan menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan pembangunan ekonomi di Kota Tual.

Dengan demikian, penting untuk menilai sejauh mana kinerja keuangan daerah Kota Tual telah mendukung pembangunan ekonomi daerah. Evaluasi ini tidak hanya diperlukan untuk mengidentifikasi efisiensi penggunaan anggaran, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap kebijakan fiskal memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana dinyatakan oleh Syamsi (2023), kinerja keuangan yang baik akan memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam membiayai pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ini, penelitian mengenai evaluasi kinerja keuangan Kota Tual menjadi relevan karena mampu menggambarkan hubungan antara tata kelola fiskal dan keberhasilan pembangunan ekonomi lokal. Hasil kajian semacam ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi perumusan kebijakan daerah yang lebih berorientasi pada kinerja dan hasil.

2. KAJIAN TEORI

Kerangka Teoretis

Kerangka teoretis tentang pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi berakar pada teori desentralisasi fiskal yang dikemukakan oleh Wallace E. Oates (1972). Dalam *Decentralization Theorem*, Oates menegaskan bahwa pelimpahan kewenangan fiskal kepada pemerintah daerah memungkinkan penyediaan layanan publik yang lebih efisien karena keputusan diambil lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat (Nurjaman, 2026). Teori ini kemudian dikembangkan dalam generasi kedua desentralisasi yang menekankan pentingnya insentif akuntabilitas lokal dan kapasitas fiskal daerah sebagai faktor kunci peningkatan kinerja keuangan. Dalam konteks ini, kinerja keuangan daerah bukan sekadar hasil administrasi, tetapi juga mencerminkan kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya fiskal secara

mandiri, efektif, dan efisien guna mencapai tujuan pembangunan ekonomi (Oates, 1999; Rodden, 2003).

Model pertumbuhan endogen yang dikembangkan oleh Robert J. Barro (1990), memberikan landasan teoretis mengenai bagaimana kinerja fiskal daerah dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Barro menegaskan bahwa belanja pemerintah berfungsi sebagai *public capital* yang dapat meningkatkan produktivitas total faktor (TFP) apabila dialokasikan secara efisien pada sektor-sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Aschauer (1989), sebelumnya juga menemukan bahwa peningkatan investasi pemerintah dalam infrastruktur publik secara signifikan meningkatkan produktivitas sektor swasta dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, peningkatan kinerja keuangan daerah yang tercermin dari rasio kemandirian, efektivitas, dan efisiensi diharapkan dapat memperbesar ruang fiskal untuk belanja produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, termasuk di wilayah kepulauan seperti Kota Tual (Tresnaningsih et al., 2026).

Kinerja keuangan daerah secara operasional diukur melalui indikator seperti rasio kemandirian keuangan daerah (perbandingan PAD terhadap total pendapatan), efektivitas dan efisiensi pemungutan pendapatan, serta derajat desentralisasi fiskal (Tambunan, 2017; Handayani & Ahilun, 2023). Indikator-indikator tersebut mencerminkan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dari sumber pendapatan lokal serta sejauh mana anggaran publik digunakan secara ekonomis. Studi empiris oleh Fauji dan Syafitri (2024) menunjukkan bahwa peningkatan PAD dan efisiensi pengelolaan anggaran berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia. Hasil ini sejalan dengan temuan Muhamad et al., (2025), yang menegaskan bahwa desentralisasi fiskal yang disertai dengan peningkatan kualitas tata kelola fiskal mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Hubungan antara kinerja keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi tidak bersifat linear, melainkan bergantung pada kualitas tata kelola serta arah kebijakan belanja publik. Barro (1990) menunjukkan bahwa efek positif belanja pemerintah terhadap pertumbuhan akan menurun jika proporsi belanja tidak produktif meningkat. Dalam konteks Indonesia, penelitian Thoha dan Novianti (2024), mengonfirmasi bahwa peningkatan belanja modal yang didukung efisiensi fiskal memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, sedangkan belanja konsumtif justru melemahkan dampaknya. Oleh karena itu, kerangka teoritis penelitian ini berasumsi bahwa kinerja keuangan daerah yang baik—ditunjukkan melalui peningkatan kemandirian, efektivitas, dan efisiensi fiskal—akan mendorong

pertumbuhan ekonomi Kota Tual melalui peningkatan alokasi belanja modal yang produktif dan perbaikan tata kelola keuangan daerah.

Penelitian Empiris

Penelitian empiris mengenai hubungan antara kinerja keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi telah banyak dilakukan baik di tingkat nasional maupun internasional. Aschauer (1989) menjadi salah satu pelopor dengan temuannya bahwa belanja publik yang produktif, khususnya pada infrastruktur, memiliki pengaruh positif signifikan terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat. Hasil ini diperkuat oleh Barro (1990) yang melalui model pertumbuhan endogen menunjukkan adanya hubungan positif namun non-linear antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi—di mana efektivitas penggunaan anggaran menjadi penentu utama. Selanjutnya, Easterly dan Rebelo (1993) dalam studi lintas negara menemukan bahwa pengeluaran publik untuk infrastruktur dan pendidikan berkorelasi positif dengan pertumbuhan, sementara pengeluaran yang bersifat konsumtif tidak menunjukkan dampak berarti. Temuan-temuan awal ini menjadi fondasi bagi penelitian mengenai efisiensi fiskal dan desentralisasi ekonomi di negara berkembang, termasuk Indonesia.

Dalam konteks negara berkembang, Davoodi dan Zou (1998) meneliti pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di 46 negara dan menemukan bahwa dampaknya bergantung pada kapasitas institusional daerah dalam mengelola keuangan publik. Hasil serupa dikemukakan oleh Martinez-Vazquez dan McNab (2003), yang menyatakan bahwa desentralisasi fiskal mendorong pertumbuhan apabila disertai peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Di Indonesia, Halim dan Abdullah (2006) menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah yang diukur melalui rasio kemandirian dan efisiensi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional, terutama bila didukung oleh peningkatan PAD. Temuan ini menegaskan bahwa kemampuan daerah dalam menggali sumber pendapatan lokal merupakan kunci penting bagi keberhasilan desentralisasi fiskal dalam memacu pertumbuhan ekonomi.

Studi empiris lebih mutakhir menyoroti mekanisme perantara antara kinerja keuangan dan pertumbuhan melalui belanja modal publik. Dama (2018) menunjukkan bahwa peningkatan belanja modal yang bersumber dari PAD memiliki korelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia, dengan catatan bahwa alokasi harus diarahkan pada sektor infrastruktur dan pelayanan dasar. Penelitian Arham dan Akib (2022), menggunakan data panel 34 provinsi di Indonesia dan menemukan bahwa desentralisasi fiskal dan kualitas tata kelola publik berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan

human development index sebagai variabel mediasi. Sapthu (2023) menambahkan bahwa PAD dan efektivitas keuangan daerah secara langsung meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kapasitas investasi daerah. Temuan-temuan ini memperkuat argumen bahwa pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada kemampuan fiskal daerah dalam mengalokasikan anggaran secara produktif.

Di sisi lain, beberapa penelitian menemukan hasil yang beragam terkait hubungan antara kinerja fiskal dan pertumbuhan. Rahman (2020) dalam studi panel kabupaten/kota di Indonesia menemukan bahwa rasio kemandirian fiskal berpengaruh positif, namun efisiensi belanja daerah belum signifikan karena rendahnya kualitas perencanaan anggaran. Saputri (2023) melalui pendekatan *moderating variable* menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi memperkuat hubungan antara pendapatan asli daerah dan belanja modal, menunjukkan adanya efek timbal balik antara kinerja fiskal dan output ekonomi. Hasil serupa dilaporkan oleh Purba et al., (2024) yang menegaskan bahwa kinerja keuangan daerah memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung melalui peningkatan belanja modal publik di Sumatera Utara. Penelitian-penelitian ini mempertegas pentingnya efisiensi dan efektivitas pengeluaran publik sebagai jalur transmisi utama kinerja fiskal terhadap pertumbuhan.

Temuan empiris terbaru menunjukkan bahwa dari sisi geografis juga memengaruhi efektivitas kinerja fiskal terhadap pertumbuhan. Rasyid et al., (2022) menunjukkan bahwa di wilayah kepulauan Indonesia Timur, seperti Maluku dan Nusa Tenggara, efek positif kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi lebih kuat ketika didukung oleh investasi pada infrastruktur konektivitas antarwilayah. Sementara itu, Sapthu et al., (2024) menemukan bahwa perbaikan kualitas tata kelola fiskal daerah secara signifikan memperkuat pengaruh kemandirian keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Secara keseluruhan, dua belas penelitian di atas menunjukkan konsensus bahwa kinerja keuangan daerah yang baik—yang ditandai dengan peningkatan kemandirian, efektivitas, efisiensi, dan alokasi belanja produktif—mampu mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, meskipun besarnya pengaruh dipengaruhi oleh kapasitas tata kelola dan kondisi struktural daerah seperti di Kota Tual.

3. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Tual. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan realisasi APBD, laporan keuangan pemerintah daerah, serta publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) selama

periode tahun tertentu (misalnya 2015–2024). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi daerah, yang diukur melalui laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Variabel independen adalah kinerja keuangan daerah, yang direpresentasikan oleh tiga indikator utama, yaitu: (1) Kemandirian Fiskal, diukur melalui rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah; (2) Efisiensi Anggaran, diukur dari perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran yang ditetapkan; dan (3) Efektivitas Pengelolaan Keuangan, diukur dari rasio realisasi pendapatan terhadap target yang ditetapkan. Pendekatan ini memungkinkan analisis keterkaitan antarvariabel secara empiris dengan mempertimbangkan dinamika fiskal yang khas di wilayah kepulauan seperti Kota Tual.

Analisis data dilakukan menggunakan metode regresi linear berganda untuk menguji pengaruh parsial dan simultan dari ketiga indikator kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebelum dilakukan regresi, data diuji melalui uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi) untuk memastikan validitas model. Model analisis dirumuskan sebagai berikut:

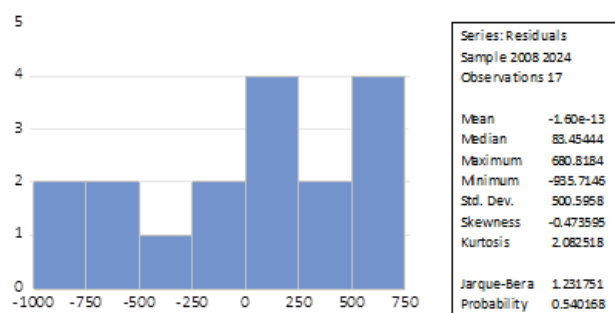
$$PE = \alpha + \beta_1 KF + \beta_2 EA + \beta_3 EPK + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

- PE = Pertumbuhan Ekonomi
- KF = Kemandirian Fiskal
- EA = Efisiensi Anggaran
- EPK = Efektivitas Pengelolaan Keuangan
- α = Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi
- ε_{it} = Komponen galat

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas



Gambar 1. Uji Normalitas.

Sumber: Hasil Pengolahan Eviews.

Berdasarkan hasil uji normalitas residual yang ditampilkan pada histogram dan statistik Jarque-Bera di atas, dapat disimpulkan bahwa data residual terdistribusi normal. Nilai Jarque-Bera sebesar 1.231751 dengan probabilitas (p-value) 0.540168 yang lebih besar dari 0.05 menunjukkan bahwa tidak ada cukup bukti untuk menolak hipotesis nol (H_0) tentang normalitas residual. Artinya, sebaran kesalahan (residual) dalam model regresi antara kemandirian fiskal daerah dan pertumbuhan ekonomi cenderung mengikuti distribusi normal.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas White.

F-statistic	13.90802	Prob. F(9,7)	0.0611
Obs*R-squared	16.09966	Prob. Chi-Square(9)	0.0648
Scaled explained SS	5.095782	Prob. Chi-Square(9)	0.8259

Sumber: Hasil Pengolahan Eviews.

Berdasarkan hasil Uji Heteroskedastisitas White, diperoleh nilai Probabilitas F (0.0611) dan Probabilitas Obs*R-squared (0.0648), keduanya lebih besar dari taraf signifikansi 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi antara kemandirian fiskal daerah dan pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, varians residual dari model bersifat konstan (homoskedastis). Kondisi ini penting karena salah satu asumsi utama dalam model regresi klasik (OLS) adalah homoskedastisitas, yang menjamin bahwa estimasi koefisien regresi bersifat efisien (BLUE — Best Linear Unbiased Estimator).

Uji Autokorelasi

Tabel 2. Hasil Uji Autokorelasi Breusch–Godfrey.

F-statistic	0.875856	Prob. F(2,11)	0.4436
Obs*R-squared	2.335302	Prob. Chi-Square(2)	0.3111

Sumber: Hasil Pengolahan Eviews.

Berdasarkan hasil Uji Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test, diperoleh nilai Probabilitas F (0.4436) dan Probabilitas Chi-Square (0.3111) yang keduanya lebih besar dari taraf signifikansi 0.05. Hal ini berarti hipotesis nol (H_0) yang menyatakan tidak ada autokorelasi hingga lag ke-2 tidak dapat ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah autokorelasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa nilai residual dari satu observasi tidak memiliki hubungan sistematis dengan residual pada observasi lainnya.

Uji Multikolinearitas

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas.

	Coefficient	Uncentered	Centered
Variable	Variance	VIF	VIF
C	813639.2	44.84663	NA
KF	0.006764	201.5513	7.494297
EA	1.67E-07	52.91190	5.751692
EPK	995.7963	52.18664	2.738664

Sumber: Hasil Pengolahan Eviews.

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas di atas, terlihat bahwa nilai Centered VIF untuk variabel *Kemandirian Fiskal (KF)* sebesar 7.49, *Efisiensi Anggaran (EA)* sebesar 5.75, dan *Efektivitas Pengelolaan Keuangan (EPK)* sebesar 2.74. Karena seluruh nilai VIF masih di bawah batas umum 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas serius antarvariabel independen dalam model.

Uji Signifikansi t, F, dan R²

Tabel 4. Hasil Estimasi Regresi dan Uji Signifikansi.

Variabel	Coefisien	t-Statistik	Probabilitas
C	-8186.940	-9.076234	0.0000
KF	0.579323	7.043941	0.0000
EA	-0.002644	-6.469725	0.0000
EPK	45.16673	1.431309	0.1759
R-squared	0.878357		
Adjusted R-squared	0.850286		
F-statistic	31.29009		0.000003
Durbin-Watson stat	1.481771		

Sumber: Hasil Pengolahan Eviews.

Uji t (parsial). Secara individual, KF ($\beta=0,5793$; $t=7,044$; $p=0,0000$) berpengaruh positif dan signifikan terhadap PE; setiap kenaikan KF menaikkan PE secara bermakna (ceteris paribus). EA ($\beta=-0,002644$; $t=-6,470$; $p=0,0000$) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PE; efisiensi yang diukur dalam model ini berkorelasi dengan penurunan PE (kemungkinan karena pengetatan/pemangkasan belanja produktif). EPK ($\beta=45,1667$; $t=1,431$; $p=0,1759$) tidak signifikan, sehingga secara statistik belum dapat disimpulkan berpengaruh terhadap PE. Intersep C= $-8186,94$ ($p<0,01$) signifikan namun lebih bersifat teknis ketimbang substantif.

Uji F (simultan). Nilai $F=31,2901$ dengan $p\text{-value}=0,000003$ menunjukkan bahwa KF, EA, dan EPK secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap PE. Dengan demikian, hipotesis nol bahwa seluruh koefisien slope = 0 ditolak, dan model dengan ketiga variabel independen lebih baik dibandingkan model tanpa prediktor.

Koefisien determinasi. $R^2=0,8784$ menunjukkan bahwa sekitar 87,84% variasi PE dapat dijelaskan oleh KF, EA, dan EPK dalam model; Adjusted $R^2=0,8503$ menegaskan kecocokan (goodness-of-fit) yang sangat baik setelah mengoreksi jumlah prediktor dan ukuran sampel. Secara praktis, model memiliki daya jelaskan tinggi, dengan kontribusi utama berasal dari KF (positif) dan EA (negatif), sementara EPK belum terbukti signifikan.

Pembahasan

Secara ekonomi, hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kemandirian fiskal daerah berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Daerah yang memiliki kemampuan mengelola dan memanfaatkan sumber pendapatan asli secara optimal dapat meningkatkan kapasitas fiskalnya untuk membiayai pembangunan tanpa terlalu bergantung pada pemerintah pusat. Kemandirian fiskal memungkinkan pemerintah daerah lebih fleksibel dalam merancang kebijakan ekonomi lokal, mempercepat penyediaan infrastruktur, serta memperluas kegiatan ekonomi produktif. Hal ini memperkuat teori desentralisasi fiskal yang menyebutkan bahwa otonomi keuangan yang kuat dapat meningkatkan efisiensi dan responsivitas kebijakan pembangunan terhadap kebutuhan masyarakat.

Sebaliknya, efisiensi anggaran justru menunjukkan arah hubungan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Fenomena ini mengindikasikan bahwa efisiensi yang terlalu ketat dapat mengurangi belanja publik produktif yang seharusnya menjadi stimulus ekonomi. Dalam konteks daerah, efisiensi sering diterjemahkan sebagai penghematan anggaran yang justru menekan realisasi proyek-proyek pembangunan dan investasi publik. Sementara itu, efektivitas pengelolaan keuangan daerah belum berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, yang dapat disebabkan oleh lemahnya implementasi kebijakan atau belum optimalnya kualitas belanja daerah. Secara keseluruhan, hasil ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah lebih banyak ditentukan oleh kemampuan fiskal dan kebijakan pengeluaran yang produktif daripada sekadar efisiensi administratif semata.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemandirian fiskal daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, menandakan bahwa

semakin mandiri suatu daerah dalam mengelola pendapatan dan belanja publik, semakin besar kontribusinya terhadap peningkatan kegiatan ekonomi lokal. Sebaliknya, efisiensi anggaran berpengaruh negatif dan signifikan, yang mengindikasikan bahwa efisiensi yang terlalu ketat dapat mengurangi ruang bagi belanja pembangunan yang produktif. Sementara itu, efektivitas pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan, sehingga belum mampu memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah menuntut keseimbangan antara kemandirian fiskal yang kuat, efisiensi yang terarah pada produktivitas, dan pengelolaan keuangan yang benar-benar efektif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Saran

Pemerintah daerah perlu memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi pendapatan asli daerah dan diversifikasi sumber penerimaan yang berkelanjutan, sehingga ketergantungan terhadap transfer pusat dapat dikurangi. Selain itu, kebijakan efisiensi anggaran perlu diarahkan bukan semata pada penghematan, tetapi pada alokasi belanja yang produktif dan mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di sektor infrastruktur, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan publik dengan memperkuat perencanaan berbasis kinerja, transparansi, serta akuntabilitas penggunaan dana publik. Dengan demikian, kebijakan fiskal daerah tidak hanya efisien secara administratif, tetapi juga efektif dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arham, M. A., & Akib, F. H. Y. (2022). Supporting factors for labor productivity in Indonesia. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 10(5), 297–310.
- Aschauer, D. A. (1989). Does public capital crowd out private capital? *Journal of Monetary Economics*, 24(2), 171–188.
- Barro, R. J. (1990). Government spending in a simple model of endogeneous growth. *Journal of Political Economy*, 98(5, Part 2), S103–S125.
- Davoodi, H., & Zou, H. (1998). Fiscal decentralization and economic growth: A cross-country study. *Journal of Urban Economics*, 43(2), 244–257.
- Easterly, W., & Rebelo, S. (1993). Fiscal policy and economic growth. *Journal of Monetary Economics*, 32(3), 417–458.
- Fauji, Z., & Syafitri, W. (2024). The impact of local governance and regional own-source revenue on economic growth at the district level in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 27(2), 153–174.
- Frinaldi, A., Asnil, A., & Putri, N. E. (2025). Analisis Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten

- Tanah Datar Tahun 2024: Kinerja Fiskal, Efektivitas Pengelolaan PAD, dan Tantangan Kemandirian Keuangan Daerah. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(11), 3113–3120.
- Halim, A., & Abdullah, S. (2006). Hubungan dan masalah keagenan di pemerintahan daerah: sebuah peluang penelitian anggaran dan akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2(1), 53–64.
- Handayani, F., & Ahilun, W. (2023). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2017-2021. *Visioner: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 12(01), 41–48.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Otonomi & manajemen keuangan daerah: edisi terbaru*. Penerbit Andi.
- Martinez-Vazquez, J., & McNab, R. M. (2003). Fiscal decentralization and economic growth. *World Development*, 31(9), 1597–1616.
- Muhamad, W. L., Arham, M. A., & Djuuna, R. F. (2025). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2024. *Jurnal Economic Resource*, 8(2), 1166–1180.
- Mulia, S., & Widiatmoko, J. (2025). Determinan kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 9(1), 2142–2161.
- Nurjaman, A. (2026). *Otonomi daerah dalam perspektif teori dan praktik di Indonesia*. UMMPress.
- Oates, W. E. (1999). An essay on fiscal federalism. *Journal of Economic Literature*, 37(3), 1120–1149.
- Purba, S., Purba, R. A., Simangunsong, L. Y., Gultom, N., & Sinaga, A. P. R. (2024). Financial Reporting Analysis To Measure The Financial Performance Of The Local Government Of Toba Regency. *INDONESIAN JOURNAL ACCOUNTING Учредители: I Learning Journal Center*, 5(2), 109–123.
- Rahmadia, A., Halim, A., & Mahsun, M. (2017). *STRATEGI PENINGKATAN KINERJA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL*. STIE Widya Wiwaha.
- Rasyid, S. B. A., Purnomo, E. P., Salsabila, L., & Fathani, A. T. (2022). Discourse analysis of online news on green economy and blue economy for sustainable development: the case in Indonesia. *Fronteira: Journal of Social, Technological and Environmental Science*, 11(1), 165–180.
- Rodden, J. (2003). Reviving Leviathan: fiscal federalism and the growth of government. *International Organization*, 57(4), 695–729.
- Sapthu, A. (2023). LISTRIK DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI MALUKU. *Jurnal Cita Ekonomika*, 17(2), 199–207.
- Sapthu, A., Bugis, M., Serang, M. R., & Laitupa, A. A. (2024). ANALISIS PENGARUH TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI MALUKU. *Jurnal Cita Ekonomika*, 18(1), 34–43.
- Saputri, L. D. (2023). The effect of local government revenue on capital expenditures with economy growth as moderating. *Proceeding International Conference on Accounting and Finance*, 84–92.
- Sulastri, E., Umar, A., Syaputra, K. A., & Zohandy, D. E. P. (2025). Peran pemerintah Indonesia

dalam pemerataan pembangunan ekonomi di daerah. *Journal of Gender Equality and Social Inclusion (GESI)*, 4(1), 22–28.

- SYAMSI, R. (2023). *PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, INTERGOVERNMENTAL REVENUE DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Pada Pemerintah Kota/Kabupaten Se-Maluku Tahun 2016-2020)*. Universitas Mercu Buana-Menteng.
- Tambunan, J. (2017). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jambi. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 2(1), 14–27.
- Tatarkin, D. A., Sidorova, E. N., & Trynov, A. V. (2015). Optimization of Financial Flow Management Based on Estimates of Regional Multiplicative Effects. *Ekonomika Regiona= Economy of Regions*, 4, 323.
- Tethool, L. P. (2017). Pengembangan Kapasitas Inspektorat Dalam Meningkatkan Kinerja Pengawasan Di Kota Tual. *Jurnal Paradigma*, 2(2), 202–211.
- Thoha, M. N. F., & Novianti, F. A. (2024). Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Rasio Efisiensi, Rasio Desentralisasi Fiskal, dan Rasio Kemandirian Daerah Terhadap Belanja Modal Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022. *Jurnal Portofolio: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 3(3), 254–263.
- Tresnaningsih, S., Rohadin, R., & Erna, E. (2026). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN APBD DALAM MENINGKATKAN KINERJA KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2020-2024: Implementation of Regional Budget (APBD) Policies in Improving Regional Financial Performance in Indramayu Regency During 2020–2024. *Jurnal Investasi*, 12(2), 138–148.